

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta penjelasan yang telah dibahas, dapat ditarik kesimpulan dalam perspektif model implementasi kebijakan menurut Merilee S Grindle yang terdiri dari 2 (dua) indikator yang masing-masing terdapat sub-sub indikator. Pertama, kesimpulan dari indikator isi kebijakan sebagai berikut:

1. **Kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan**

Dapat dikatakan sudah sesuai dengan indikator teori yang digunakan karena adanya faktor pendukung bahwa kebijakan Peraturan Presiden Nomor 83 Tentang Penanganan Sampah Laut dapat dikatakan tidak ada kepentingan individu yang mempengaruhi. Maka salah satu program penelitian dan mengatasi pencemaran sampah di laut dapat dikatakan tepat sasaran sesuai karena tersedianya data dan hasil kajian dampak sampah di laut.

2. **Jenis Manfaat yang dihasilkan**

Dapat dikatakan sudah sesuai dengan indikator teori yang digunakan karena terdapat faktor pendukung bahwa masyarakat kampung nelayan wilayah pesisir Muara Angke dan pemerintah kota administrasi Jakarta Utara mulai merasakan dampak positif yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan penanganan sampah laut melalui program penyediaan prasarana pengambilan sampah di sungai, komitmen eksekutif (pusat dan daerah) memprioritaskan alokasi anggaran di sektor pengelolaan sampah plastik serta pemberian reward kepada pemerintah daerah, pengelola dan masyarakat atas ketaatan dan pelanggaran SOP (Standar Operasional Prosedur) pengelolaan.

3. **Seberapa besar perubahan yang ingin dicapai melalui implementasi**

Dapat dikatakan belum sesuai dengan indikator teori, karena dengan adanya faktor pendukung keberhasilan program implementasi

penanganan sampah laut yaitu kerja sama, peraturan pengelolaan sampah produsen, pemenuhan sumber daya serta sarana prasarana. Tetapi masih belum mencapai target pengurangan sampah yang masuk ke laut karena terdapat faktor penghambat dalam proses pelaksanaan diantaranya yaitu faktor alam serta kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat wilayah pesisir laut Muara Angke Jakarta Utara.

4. Letak pengambilan keputusan

Dapat dikatakan sudah sesuai dengan apa yang indikator teori inginkan karena letak pengambilan keputusan berada pada para pengambil keputusan dalam kebijakan yang sudah relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh kebijakan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 ini dan masuk ke dalam salah satu program memperkuat kelembagaan. Sehingga akan memudahkan dalam melakukan implementasinya.

5. Pelaksanaan program

Dapat dikatakan sudah sesuai dengan apa yang indikator teori karena pemerintah pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pemerintah daerah Dinas Lingkungan Hidup serta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu sudah sangat berupaya dalam menjalankan peran sesuai apa yang dibutuhkan program kebijakan penanganan sampah laut.

6. Sumber daya yang mendukung

Belum dapat dikatakan sesuai indikator teori yang digunakan karena terdapat faktor penghambat untuk memenuhi sumber daya mendukung dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah laut diantaranya, anggaran untuk pengelolaan sampah tidak besar, implementasi dari tiap regulasi sampah yang ada masih kurang efektif serta kekurangan dana untuk membeli teknologi pengelolaan sampah yang lebih canggih.

Kesimpulan dari indikator lingkungan implementasi sebagai berikut:

7. Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat Belum dapat dikatakan sesuai dengan indikator teori yang digunakan karena walaupun pemerintah pusat dan daerah sudah membuat strategi yang baik dengan terus berupaya melalui pelaksanaan program Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut, namun akan sama saja jika masih terdapat faktor penghambat yakni kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pencemaran laut oleh sampah serta kurangnya pemahaman pentingnya dalam memilah sampah dan mengolah sampah mereka sendiri dan program punishment yang belum berjalan dengan optimal.
8. Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa  
Dapat dikatakan sudah sesuai dengan teori yang digunakan karena pemerintah pusat dan daerah sudah sangat berkomitmen dalam menjalankan peran dan tanggung jawab dalam melaksanakan program yang ada pada kebijakan penanganan sampah laut di wilayah pesisir Muara Angke Jakarta Utara.
9. Tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana  
Belum dapat dikatakan sesuai dengan indikator teori yang digunakan karenawalaupun pemerintah pusat dan daerah aktif dalam merespons kebijakan penanganan sampah laut. Namun masih perlu ditingkatkan kembali karena masih belum mencapai target yang diinginkan kebijakan penanganan sampah laut yakni mengurangi kebocoran sampah plastik yang masuk ke laut sebanyak 70%.

## 6.2 Saran

Hal yang menjadi masukan dalam penelitian kebijakan penanganan sampah laut di wilayah pesisir Muara Angke ini adalah:

1. Berdasarkan temuan penelitian program reward dan punishment sudah diberlakukan namun dalam pelaksanaannya baru *reward* yang diterapkan *punishmentnya* belum dilakukan secara optimal.

Sehingga untuk mengefektifkan punishment terhadap masyarakat dalam menjagalingkungan laut dari sampah plastik.

2. Perlu dilakukannya advokasi oleh masyarakat atau melalui komunitas masyarakat yang peduli lingkungan terkait sampah laut untuk bisa segera mengeluarkan regulasi ditingkat pemerintah provinsi DKI Jakarta yang bertujuan melindungi laut dari sampah plastik.
3. Dapat melakukan berbagai program yang minim anggaran yakni memfokuskan pada pencegahannya terlebih dahulu. Seperti meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan komunitas pada program pembersihan sampah laut bersama.